

Kebijakan Strategis PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN

DI INDONESIA

Rumusan Masalah

- bagaimana pemetaan berbagai permasalahan di sektor kelautan?
- bagaimana implementasi berbagai kebijakan yang telah dibuat?
- bagaimana kebijakan strategis pembangunan ekonomi kelautan yang dibutuhkan bagi penguatan sektor kelautan Indonesia?

Tujuan Penelitian

- memetakan permasalahan di sektor kelautan
- mengetahui implementasi kebijakan yang telah dibuat
- menganalisis kebijakan strategis pembangunan ekonomi kelautan yang dibutuhkan bagi penguatan sektor kelautan Indonesia

Manfaat Penelitian

- mengembangkan wawasan & memperkuat khasanah pengetahuan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan
- bahan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, & pengawasan

Desain Penelitian

penelitian deskriptif dengan pendekatan KUALITATIF

Teknik Sampling

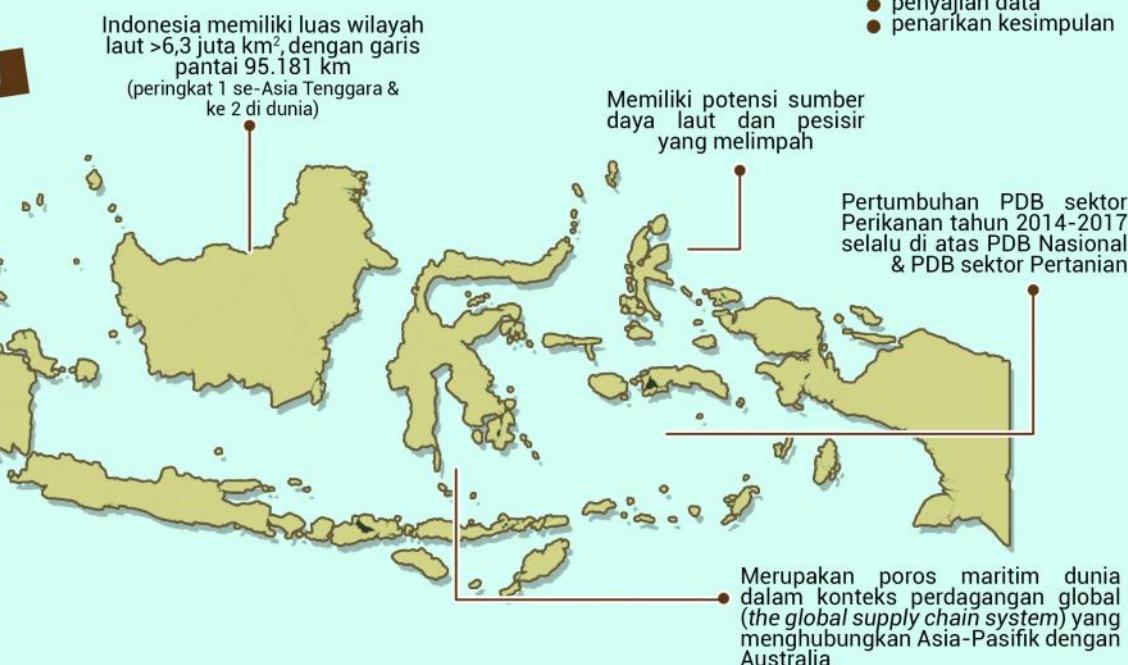
penelitian dilakukan di Provinsi Banten dan Jawa Barat

Instrumen Pengumpulan Data

wawancara & *focus group discussion*, Data sekunder dari BPS, literatur, Komisi IV DPR RI, & Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Perikanan

HASIL PENELITIAN

Pembangunan di sektor kelautan berhasil meningkatkan:
- Nilai Tukar Nelayan (NTN),
- nilai ekspor sektor perikanan,
- konsumsi ikan



Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia :

- keterbatasan SDM
- menurunnya jumlah nelayan
- *overfishing*
- praktik ilegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing

Permasalahan dalam pengembangan perikanan budidaya :

- implementasi kebijakan tata ruang dan zonasi wilayah pesisir & pulau-pulau kecil
- rendahnya produktivitas & daya saing usaha
- belum optimalnya integrasi sistem produksi hulu & hilir
- terbatasnya penyediaan sarana & prasarana

Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah :

- moratorium perizinan bagi kapal eks-asing
- penenggelaman kapal ilegal
- larangan bongkar muat kapal di laut
- perlindungan HAM untuk nelayan
- larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan
- meningkatkan transparansi pengelolaan kelautan & perikanan

Kebijakan Pemerintah yang dianggap memberatkan :

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/2014 dan No. 57/2014 yang melarang alih muat di tengah laut
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik
- Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negaran Bukan Pajak yang berlaku pada KKP

Konsep **NEGARA KEPULAUAN** sangat besar manfaatnya bagi Indonesia karena dapat menjadikan laut sebagai penyatu pulau-pulau serta memperluas wilayah perairan Indonesia.

Sumber daya kelautan Indonesia merupakan wilayah **MARINE MEGA BIODIVERSITY**, yang memiliki banyak potensi (sumber daya ikan tangkap, perikanan budidaya, dan budidaya laut lainnya)

Manfaat pembangunan kelautan & perikanan:

- meningkatkan PDB perikanan
- meningkatkan produksi perikanan
- meningkatkan konsumsi ikan, produk olahan, & surplus produksi garam
- meluasnya kawasan konservasi & pengelolaan/pengawasan pulau-pulau kecil

Kebijakan diharapkan kepada **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (sustainable development)** yang mempertimbangkan konsep negara kepulauan & potensi kelautan yang besar

